

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan konsep yang mencakup tiga aspek utama dalam praktik bisnis berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Di Indonesia, penerapan ESG telah diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Peraturan terbaru terkait ESG di Indonesia meliputi POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun Laporan Keberlanjutan yang mencakup aspek ESG. Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang memberikan pedoman teknis penyusunan laporan tersebut. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mewajibkan emiten tertentu, khususnya yang tergabung dalam indeks IDX ESG Leaders, untuk menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan. Sedangkan ada juga UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek ESG.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan kinerja ESG dapat disebabkan oleh aspek tata kelola perusahaan, terutama efektivitas peran dewan komisaris sebagai pengawas manajemen menurut Eccles *et al.* (2014).

Dewan komisaris sebagai pengawas manajemen memegang peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan ESG. Namun, masih minim penelitian yang secara komprehensif menguji bagaimana keberagaman gender dalam dewan, keberadaan komisaris independen, dan ukuran dewan dalam memengaruhi ESG, khususnya pada sektor keuangan di Indonesia dalam periode terkini (2021–2023). Masih adanya perusahaan yang belum konsisten menerapkan ESG meskipun memiliki struktur dewan yang ideal menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini.

Sektor keuangan dipilih dalam penelitian ini karena memiliki peran sentral dalam mendorong praktik keberlanjutan (ESG) di seluruh sektor ekonomi. Sebagai pengelola sumber daya keuangan, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan manajer investasi memiliki pengaruh besar dalam mengalirkan modal ke kegiatan usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selain itu, sektor ini berada di bawah pengawasan regulasi yang ketat dan diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan keuangan berkelanjutan (OJK, 2021). Oleh karena itu, menganalisis pengaruh karakteristik tata kelola seperti keberagaman gender, dewan komisaris, dan ukuran dewan terhadap kinerja ESG di sektor ini menjadi sangat relevan dan penting.

Keberagaman gender dalam dewan komisaris menjadi salah satu aspek penting dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam konteks penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut *International Finance Corporation* (IFC) (Niethammer & Moline, 2011), keberadaan perempuan di dewan direksi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi risiko kelompok homogen, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara keseluruhan. Selain itu, *World Economic Forum* (Bernstein & Salipante, 2023) menekankan bahwa dewan yang beragam secara gender mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai kesetaraan dan keberlanjutan, yang semakin penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan daya saing jangka panjang. Oleh karena itu, keterwakilan gender dalam dewan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan, tetapi juga dapat menjadi faktor yang mendorong kualitas implementasi ESG secara lebih menyeluruh. Keberagaman gender dalam dewan komisaris, diukur melalui proporsi jumlah komisaris perempuan terhadap total anggota dewan komisaris. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memberikan ruang keterwakilan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.

Komisaris independen memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, termasuk dalam implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Komisaris independen

merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, ataupun hubungan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2016). Sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, komisaris independen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan mendorong manajemen agar menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Komisaris independen diukur melalui proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Proporsi ini menjadi indikator utama dalam menilai tingkat independensi dewan dalam mengawasi penerapan prinsip ESG secara kredibel.

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang diyakini memiliki implikasi terhadap efektivitas pengawasan dan arah strategis perusahaan, termasuk dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2016), ukuran dewan harus cukup untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif, tanpa menjadi terlalu besar sehingga menghambat diskusi dan pengambilan keputusan yang efisien. Jumlah anggota dewan komisaris mencerminkan kapasitas organisasi dalam mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan nilai keberlanjutan.

Dewan yang berukuran lebih besar secara teoritis memiliki keunggulan dari segi keragaman keahlian, pengalaman, dan perspektif yang dapat memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu ESG. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah keseluruhan anggota yang duduk dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Indikator ini mencerminkan kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan dalam mengawasi manajemen dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Meskipun regulasi ESG di Indonesia semakin kuat dan perusahaan di sektor keuangan telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan mampu menunjukkan ESG yang optimal. Beberapa perusahaan dengan struktur dewan yang ideal, seperti ukuran dewan yang besar, keberagaman gender yang tinggi, dan proporsi komisaris independen yang mencukupi, tetap tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor ESG mereka. Dalam penelitian Paolone *et al.* (2024) kurangnya pemahaman tentang bagaimana keberagaman gender dan budaya di dewan komisaris memengaruhi kinerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*) di sektor perbankan Eropa, terutama dalam konteks berbagi pengetahuan menjadi suatu masalah dalam penelitiannya. Selain itu, rendahnya pengungkapan lingkungan di Indonesia, terutama pada perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor berdampak lingkungan tinggi, padahal penting untuk keberlanjutan dan transparansi Jimantoro *et al.* (2023)

Fenomena meningkatnya kesadaran terhadap ESG tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang mulai menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya tekanan global terhadap perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG secara transparan, di tengah kekhawatiran terhadap praktik “*greenwashing*”, serta berkembangnya standar pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia Mkadmi & Daafous (2025). Selain itu, peningkatan tekanan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan dampak lingkungan dan sosial mereka serta pentingnya ESG dalam pengambilan keputusan investor Nicolo *et al.* (2023)

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara tata kelola dewan dan kinerja ESG, sebagian besar studi tersebut masih didominasi oleh konteks negara maju, khususnya di kawasan Barat. Penelitian mengenai keberagaman gender, komisaris independen, dan ukuran dewan terhadap ESG memang telah dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih lagi, fokus pada sektor keuangan dan periode pasca pandemi COVID-19 (2021–2023) masih relatif minim dieksplorasi. Penelitian Atalay *et al.* (2025) menunjukkan bahwa moderasi hubungan antara *board gender diversity* (BGD) dan ESG belum banyak dikaji secara komprehensif di negara berkembang. Arhinful *et al.* (2024) juga menekankan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya dilakukan di negara Barat, sementara hubungan antara board governance dan ESG dalam konteks Asia, termasuk Jepang maupun negara berkembang lainnya, masih

kurang mendapat perhatian secara empiris. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan riset dalam konteks negara berkembang guna memperkaya pemahaman terhadap dinamika implementasi ESG di berbagai kerangka tata kelola perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang positif dan tidak signifikan antara keberagaman gender, komisaris independen dan ukuran dewan terhadap ESG Zachary & Fuad (2025) dimana keberagaman gender tidak berpengaruh signifikan yang mengindikasikan bahwa meskipun perempuan memiliki kecenderungan lebih sensitif terhadap isu ESG tetapi proporsi mereka di dewan masih terlalu kecil untuk memberikan dampak yang signifikan. Komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan meskipun secara teori mereka berfungsi sebagai pengawas yang objektif, dalam praktiknya di Indonesia keberadaan mereka mungkin lebih formalitas, kurang aktif ataupun kurang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG. Lalu pada ukuran dewan berpengaruh positif dan hasil ini sesuai dengan teori keagenan dan legitimasi, dewan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kontrol manajemen yang lebih efektif.

Pada penelitian Yasin (2025) mengatakan bahwa hasil dari keberagaman gender terhadap ESG berpengaruh positif dan signifikan. Menunjukkan bahwa perempuan di dewan meningkatkan ESG, karena mereka membawa perspektif sosial, empati dan kepedulian terhadap keberlanjutan. Penelitian Paolone *et al.* (2024) memberikan hasil yang sama dimana keberagaman gender berpengaruh positif terhadap ESG, dilanjutkan dengan penelitian Atalay *et al.* (2025) sejalan

dengan penelitian sebelumnya dimana keberagaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap ESG. Dilanjutkan dengan penelitian Oyinlola (2025) mendapatkan bahwa keberagaman gender mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ESG. Begitu juga dengan penelitian Zhu *et al.* (2024) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya yaitu keberagaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap ESG. Lalu pada penelitian Abdelkader *et al.* (2024) menjelaskan bahwa keberagaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap ESG dan penelitian Gavana *et al.* (2024) juga menjelaskan bahwa keberagaman gender memberikan dampak positif signifikan terhadap ESG *disclosure*.

Penelitian Arhinful *et al.* (2024) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ESG, dimana komisaris independen memberikan pandangan netral dan pengawasan yang meningkatkan akuntabilitas terhadap ESG, pada penelitian Menicucci & Paolucci (2023) juga menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ESG lalu didukung dengan penelitian Buchetti *et al.* (2025) juga mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ESG. Lalu dilanjutkan dengan penelitian Dicuonzo *et al.* (2024) menjabarkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ESG.

Penelitian Nicolo *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan, dimana komisaris independen bertindak sebagai pengawas eksternal yang lebih objektif dan tidak memiliki

kepentingan pribadi dalam manajemen yang artinya semakin banyak komisaris independen di dewan, semakin tinggi transparansi ESG perusahaan. Pada penelitian Jimantoro *et al.* (2023) juga menjelaskan bahwa ukuran dewan dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap ESG, namun disisi lain penelitian Mkadmi & Daafous (2025) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap ESG dan menjelaskan bahwa ukuran dewan yang besar cenderung memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi efektivitas koordinasi ESG. Penelitian Agnese *et al.* (2024) juga menjelaskan bahwa ukuran dewan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ESG.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam meningkatkan ESG, yang pada akhirnya akan membantu sektor keuangan dalam membangun bisnis yang lebih berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dan penulis tertarik untuk menulis dan memilih judul skripsi sebagai berikut **“PENGARUH KEBERAGAMAN GENDER, KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN DEWAN TERHADAP ESG”**

## 1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan, masih belum optimal meskipun regulasi dan pedoman pelaporan telah ditetapkan oleh OJK dan BEI.
- b. Sektor keuangan sebagai aktor penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi belum sepenuhnya menunjukkan peran strategisnya dalam implementasi ESG, meskipun berada di bawah regulasi ketat dan memiliki struktur dewan yang ideal.
- c. Minimnya penelitian kontekstual di negara berkembang, khususnya di Indonesia, terkait hubungan antara keberagaman gender, komisaris independen, dan ukuran dewan terhadap ESG.
- d. Keterbatasan studi yang fokus pada periode terkini (2021–2023) dan pada sektor keuangan setelah pandemi COVID-19.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka fokus penelitian akan dibatasi yaitu pada variabel keberagaman gender dalam penelitian ini dibatasi adalah dewan komisaris pada suatu perusahaan, komisaris independen

dalam penelitian ini adalah jumlah komisaris independen dalam perusahaan tersebut, ukuran dewan dalam penelitian ini dibatasi dalam dewan komisaris di suatu perusahaan dan ESG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *ESG Disclosure* . Sedangkan data yang digunakan diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor keuangan pada tahun 2021-2023.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keberagaman gender berpengaruh terhadap pengungkapan ESG perusahaan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ESG perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap pengungkapan ESG perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberagaman gender terhadap pengungkapan ESG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan ESG.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran dewan terhadap pengungkapan ESG.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan telah diketahuinya hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dengan diketahui pengaruh keberagaman gender, komisaris independen dan ukuran dewan terhadap ESG, maka hasil penelitian dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya sektor keuangan.

2. Aspek Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dalam sektor keuangan.

- b. Bagi Sektor Keuangan

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan beberapa informasi yang berguna sebagai bahan saran dan masukan untuk mengetahui arti pentingnya pengaruh keberagaman gender, komisaris independen dan ukuran dewan terhadap ESG pada sektor keuangan.